

TAJUK RENCANA

Menyiapkan Penjualan Hewan Kurban

HARI Raya Idul Adha segera tiba. Umat Islam pun sudah bersiap-siap menyambutnya. Antara lain dengan menyiapkan hewan kurban yang akan disembelih pada hari besar tersebut. Usai Salat Idul Adha sampai tiga hari kemudian (hari tasyrik), umat Islam memang diperintahkan (*sunnah muakkadah*) menyembelih hewan kurban (di Indonesia umumnya sapi atau kambing). Meski sudah ada imbauan agar kurban dikonversi dana untuk mereka yang terdampak pandemi, namun kemungkinan besar masih tetap banyak umat Islam yang menyembelih hewan kurban.

Di masa pandemi ini, pelaksanaan perdagangan hewan kurban maupun penjualannya memang tidak bisa seluas seperti tahun-tahun sebelumnya. Demi kesehatan dan keselamatan bersama, semua harus mengikuti protokol kesehatan yang ketat. Terkait hal ini, sebenarnya Menteri Pertanian sudah mengeluarkan peraturan Nomor 114/Pemertan/PD.410/9/2014 tentang Pemotongan Hewan Kurban. Surat ini ditujukan kepada Gubernur, Bupati dan Wali Kota seluruh Indonesia. Kemudian disampaikan kepada dinas terkait yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan, atau instansi terkait yang membidangi fungsi kesehatan dan fungsi keagamaan, serta diteruskan juga ke organisasi masyarakat yang membidangi keagamaan.

Kini, tinggal bagaimana tindak lanjut dan pelaksanaan dari surat edaran tersebut. Hal ini mulai penjualan hewan kurban sampai pemotongannya yang harus dilakukan penyesuaian terhadap prosedur *new normal* atau kenormalan baru dalam situasi pandemi Covid-19. Untuk itu kiranya perlu ada pihak-pihak terkait yang terjun langsung di lapangan.

Dalam hal penjualan, misalnya, kalau tidak ada pihak berwenang yang turun langsung, kita sangsi apakah penjual akan disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan, baik pengaturan tata cara penjualan hewan kurban yang meliputi pembatasan waktu, layout tempat penjualan maupun penempatan fasilitas alat kebersihan. Juga penjual hewan kurban yang mesti menggunakan alat pelindung

diri (APD) minimal berupa masker, lengan panjang dan sarung tangan sekali pakai selama di tempat penjualan. Belum lagi apakah hewan kurban yang jual benar-benar sehat atau tidak, dari daerah zona hijau atau tidak?

Begitu juga saat penyembelihan, pemerintah menganjurkan agar dilakukan di Rumah Potong Hewan (RPH), yang dijamin sesuai syariat dan higienis, khususnya dari daerah zona merah. Namun apakah RPH yang ada mampu melayani semua penyembelihan hewan kurban. Padahal jumlah RPH sangat sedikit, tidak sebanding dengan hewan yang disembelih. Karena itu kalau semua ke RPH pasti akan kumulatif dalam melayani. Karena itulah Pemkab Sleman meminta panitia mengajukan rekomendasi ke Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan (DP3) Sleman.

Berdasarkan pengalaman selama ini, penyembelihan hewan kurban dilakukan oleh para takmir masjid, mushola, dan kelompok-kelompok masyarakat, yang se-DIY jumlahnya mencapai puluhan ribu. Penyembelihan dilakukan oleh tokoh agama/tokoh masyarakat setempat dibantu warga sekitar yang juga sebagai tenaga *kelet* hingga pembagian daging kepada mereka yang berhak menerima. Karena itu, pelaksanaan pemotongan hewan kurban bukan tenaga profesional, kemungkinan besar sulit dilaksanakan, apalagi juga jarang ada tenaga profesional.

Karena itulah peran pihak aparat terkait sangat dibutuhkan. Mereka harus terjun langsung ke tempat-tempat penyembelihan hewan kurban hingga ke pelosok-pelosok kampung. Tujuannya bukan sekadar melakukan pengawasan, tetapi juga mengarahkan masyarakat yang 'bekerja bakti' dalam penyembelihan hewan kurban, sehingga semua proses betul-betul disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan. Untuk itu memang dibutuhkan tenaga yang banyak. Untuk itu bisa mengerahkan tenaga sampai tingkat kecamatan maupun desa. Kiranya saat ini masih ada waktu untuk mempersiapkan semua itu. □

Musibah Data Pasien Covid-19

Yudi Prayudi

menjadi titik kritis adalah rancangan alur data pasien Covid sehingga akhirnya disampaikan kepada publik dalam bentuk data anonim.

Dimensi kedua adalah menyangkut administrasi publik dari data pasien Covid. Hal ini menyangkut keterkaitan antarinstansi. Meliputi aspek data diberikan kepada siapa, diverifikasi siapa, digunakan siapa, disetujui siapa, dipelihara siapa. Hampir setiap kabupaten dan provinsi menyiapkan website



Berdasarkan *screen shoot* yang beredar mengenai bocornya data pasien Covid, terlihat beberapa *field* data yang terekspose. Nilai sebuah data yang bocor terlihat dari sejauhmana data *regulated* dan *non regulated* yang termuat dalam data yang bocor tersebut.

Secara Bisnis

Melihat *field* data Covid yang bocor, terlihat hanya beberapa *field* saja yang menarik dalam kategori *regulated data*. Demikian juga untuk data *non regulated* hanya ada beberapa *field* yang menarik untuk diolah secara bisnis. Bagi pemerintah khususnya Gugus Tugas Percepatan Penanganan *field* data tersebut tentunya bermanfaat untuk kepentingan evaluasi kebijakan serta strategi penanganan Covid ke depan.

Pandemik Covid-19 adalah sebuah musibah nasional, jangan sampai musibah ini diperberat dengan musibah kebocoran data pasien yang lebih luas. Kebocoran data pasien Covid-19 dan retentasi kasus kebocoran data lainnya yang terpublikasi luas, seharusnya menambah tekanan politis bagi DPR maupun Pemerintah untuk bersegera menyelesaikan pembahasan tentang RUU Perlindungan Data Pribadi. Insiden kebocoran data pasien Covid-19 hendaknya menjadi momentum Pemerintah untuk melakukan perbaikan terhadap tata kelola data sebagai bagian dari sistem yang terintegrasi untuk meningkatkan perlindungan data pribadi. □

**) Dr Yudi Prayudi, Kepala Pusat Studi Forensika Digital.*

Syarat Menulis Opini

Para penulis yang terhormat, Redaksi hanya akan memperhatikan tulisan artikel/opini yang dikirim ke opini@kr.com dengan disertai CV dan copy identitas diri. Panjang tulisan sekitar 3.700 karakter atau 600 kata. Demi kelancaran bersama, tidak melayani pengiriman ke akun pribadi. Terimakasih

Potensi Calon Tunggal Pilkada 2020

Haris Zaky Mubarak

konstituen masyarakat calon pemilih dalam Pilkada 2020.

Maka yang paling diuntungkan dalam kontestasi Pilkada 2020 di tengah pandemi ini adalah petahana yang menjadi kepala daerah periode pertama. Ia akan mudah memainkan ketertutupan informasi terhadap jumlah penduduk yang nantinya akan masuk Daftar Pemilihan Tetap (DPT). Dengan dalih menerapkan protokol kesehatan, kepala daerah petahana memiliki potensi untuk menyalahgunakan kekuasaan untuk memanipulasi data keseluruhan jumlah penduduk di daerahnya. Petahana juga dapat memanfaatkan kegiatan seperti bantuan sosial dan lainnya. Kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan petahana sangat masuk akal, apalagi dengan alokasi waktu yang sangat sempit.

Sampai sekarang minat orang yang ingin menjadi bakal calon kepala daerah Pilkada 2020 masih sedikit. Ketatnya protokol kesehatan dan pembatasan sosial situasi ini akan membuat banyak bakal calon peserta pilkada takut untuk ikut dalam kontestasi pemilu. Biaya tentu akan lebih besar, karena adanya penambahan biaya protokol kesehatan tim pemenangan dan juga saksi. Ini persoalan ruwet yang sudah membuat pusing para bakal calon kepala daerah untuk membiayainya.

Sejarah

Jika pada Pilkada mendatang nantinya hanya

DI TENGAH situasi pandemi Covid-19, kita bertaruh besar terhadap pemilihan kepala daerah (pilkada) 2020. Belum ada pengalaman melaksanakan pilkada saat wabah virus. Wajar jika masyarakat tidak terlalu antusias menyambutnya. Banyak kalangan memprediksi Pilkada 2020 akan dipenuhi dengan peserta calon tunggal atau pemilu melawan kotak kosong.

Salah satu alasan rasional yang mendasarinya adalah karena kekhawatiran terhadap risiko yang diterima masyarakat, peserta dan penyelenggara pemilu ketika pilkada tetap dilaksanakan pada masa pandemi. Selain itu, dalam situasi belum ada kepastian kapan berakhirnya pandemi Covid-19, penyelenggaraan pilkada serentak yang dijadwalkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 9 Desember 2020 mendatang memang tampak tak masuk akal.

Pilkada 2020 akan dilaksanakan di 270 daerah. Sembilan daerah untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 224 untuk Bupati dan Wakil Bupati, dan 37 untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota. Banyaknya daerah yang melaksanakan pilkada di tengah pandemi membuat potensi terjadinya penyimpangan pilkada sangat terbuka. Terutama pada saat pendaftaran dan pemutakhiran akumulasi keseluruhan data calon pemilih.

Dominasi Petahana

Dalam situasi abnormal seperti saat ini, pemberlakuan protokol kesehatan Covid-19 yang ketat menjadi situasi yang tak mudah bagi para calon jika harus memaksakan terjadinya kerumunan dan pengumpulan massa dalam aktivitas berkampanye. Karena pasti tidak akan mendapatkan izin. Sementara dalam cara yang lain yakni metode berkampanye melalui aplikasi teknologi dan komunikasi digital juga tak sepenuhnya mampu mengakomodir semua

ada satu pasangan calon kepala daerah atau calon tunggal maka jelas pilkada serentak 2020 ini hanya akan berbuah kontestasi pemilu kotak kosong. Ketentuan pemilu kotak kosong sendiri diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Apakah Pilkada 2020 yang diselenggarakan pada masa pandemi virus Covid-19 ini akan menjadi pilkada melawan kotak kosong terbanyak pertama dalam sejarah Indonesia? Jawaban pertanyaan ini akan dapat kita lihat pada beberapa bulan ke depan. Jika kemudian proses pelaksanaan Pilkada pada 9 Desember 2020 benar-benar akan diselenggarakan. □

**) Haris Zaky Mubarak MA, Sejarawan dan Direktur Eksekutif Jaringan Studi Indonesia.*

Pojok KR

Pasar Prawirotaman akan dikelola modern.
- Tidak lagi identik kumuh, bisa seperti mal.

Tujuh maskapai nasional divonis bersalah.
- Mungkin karena mengejar target setoran.

647 Calhaj ajukan pengembalian setoran.
- Jauh lebih banyak yang tidak mengambal.

Berabe

Pikiran Pembaca

Pikiran Pembaca terbuka bagi siapa saja. Naskah dikirim ke kantor Redaksi Kedaulatan Rakyat, Jalan Margono Utomo (P Mangkubumi) 40-42 Yogyakarta 55232 Fax (0274) 563125 Telp (0274) 565685 (Hunting) atau melalui email pikiranpembaca@gmail.com. Naskah dilengkapi fotokopi atau scan identitas diri berikut nomor telepon yang bisa dihubungi. Isi tanggung jawab penulis.

Fenomena Alam di Tengah Pandemi

DI tengah pandemi Covid-19, dalam kurun waktu kurang dari 48 jam, terjadi fenomena alam secara berurutan. Minggu, 21 Juni 2020, terjadi gerhana matahari. Di Indonesia peristiwa tersebut dapat diamati di 423 kota dan kabupaten. Daerah yang memulai gerhana paling awal di Sabang, Aceh, pukul 13.16. Sedangkan kontak awal paling akhir terjadi di Melonggaue, Sulawesi Utara, pukul 17.31 WITA. Minggu, 21 Juni 2020, dua kali Gunung Merapi meletus, pukul 09.13 dan 09.27. Pada letusan eksplosif tersebut tinggi kolom mencapai 6000 meter dari puncak.

Senin, 22 Juni 2020, pukul 02.33 terjadi gempa tektonik di selatan Pulau Jawa. Gempa berkekuatan 5,0 Skala Richter pada lokasi 9,11 LS 110,85 BT terletak 107 kilometer barat daya Pacitan dengan kedalaman 63 kilometer.

Senin, 22 Juni 2020, komet atau bintang berekor yang dinamai Lemmon melintas mendekati matahari. Melintas sejak pukul 09.00 pagi dan berakhir pukul 21.00. Fenomena langka ini bisa diamati dengan mata telanjang, karena memiliki magnitude 6 atau ambang batas mata bisa melihat suatu benda bercahaya di langit.

Fenomena alam yang terjadi dapat dipandang sebagai hal yang biasa saja. Gerhana matahari sering terjadi di tata surya kita, komet sudah biasa lewat di langit kita dan erupsi gunung berapi sering menghiasi berita media lokal dan nasional. Apalagi gempa bumi, kita cukup akrab dengan fenomena alam ini. Tapi empat fenomena alam terjadi dalam waktu hampir bersamaan di tengah pandemi Covid-19, tentu memberikan makna yang berbeda bagi kita.

Salah satu hikmah yang dapat kita petik dari fenomena alam ini adalah semakin menyadari kebesaran dan keagungan Tuhan. Di tengah hiruk pikuk kita bergelut dengan Covid-19 beserta segala dampaknya, Tuhan memperlihatkan kuasaNya. Dengan terjadinya fenomena alam yang bersamaan ini semoga semakin mendekatkan kita kepadaNya, untuk selalu bersyukur nikmatNya, sehingga kita bersama-sama dapat melewati pandemi Covid-19 dengan baik dan selamat. Dan setelahnya menjadi manusia dengan derajat yang lebih baik di hadapanNya.

Suharyadi, Guru Fisika SMAN 1 Godean.

Kedaulatan Rakyat

Pemimpin Umum: M Wirmon Samawi SE MIB. **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Drs H Octo Lampito MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfi MA, Ronny Sugiantoro SPd, SE, MM. **Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPT, Joko Budhiarto, M. Susahada. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Waid. **Redaktur:** Drs Widyo Suprayogi, Dra Hj Fadmi Sustiwi, Dra Prabdari, Isnawati, Benny Kusumawan, Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, Hanik Atfiati, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSos, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSos, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Drs Sihono HT, Agung Purwandono. **Fotografer:** Efy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. **Grasis:** Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyatin.

Pemimpin Perusahaan: Fajar Kusumawardhani SE. **Kepala TU Langganan:** Drs Asri Salman, Telp (0274)- 565685 (Hunting) **Manajer Iklan:** Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklan@kr23@yahoo.com, iklan@kr13@gmail.com.

Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu'...Rp 65.000,00, Iklan Umum/Display...Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarua...Rp 12.000,00/mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris, maks. 10 baris) . Rp 12.000,00 / baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm, maks. 100 mm) Rp 12.000,00/mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm . Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/ mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300% dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990. Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, Terbit Perdana: Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margono Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting)

Alamat Peretakan: Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggung jawab peretakan

Alamat Homepage: <http://www.kr.co.id> dan www.krjogja.com. Alamat e-mail: naskahkr@gmail.com. Radio : KR Radio 107.2 FM.

Bank: Bank BNI - Rek: 003.044.0854 Cabang Yogyakarta.

Perwakilan dan Biro: Jakarta: Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. Kuasa Direksi: Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja.

Wartawan : H Imong Dewanto (Kepala Biro), H Isahq Zubaedi Raqib, Syaifulah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga. Semarang : Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Kepala Biro : Isdiyanto Isman SIP.

Banyumas : Jalan Prof Moh Yamin No 5, Purwokerto, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd. Kepala Biro : Driyanto. Klaten : Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan dan Kepala Biro : Sri Warsiti.

Magelang : Jalan Achmad Yani No 133, Magelang, Telp (0293) 363552. Kepala Perwakilan: Sumiyarsih, Kepala Biro : Drs M Thoha. Kulonprogo : Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Kepala Perwakilan : Suprpto, SPd Kepala Biro : Asrul Sani.

Gunungkidul : Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo.